

Bandung, 3 Februari 2026

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional

**Forum Konsultasi Publik
Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2027**

Sekretaris Deputi Pembangunan Kewilayahan
Kedeputan Bidang Pembangunan Kewilayahan
Kementerian PPN/Bappenas



PENGAWALAN SINKRONISASI PUSAT & DAERAH DALAM RPJMD & RPJMN 2025-2029



Kementerian PPN/
Bappenas



Direktorat
Pembangunan
Indonesia Barat

UU No.59/2024 tentang RPJPN 2025 – 2045

Pasal 10, Ayat 4

Penyusunan RPJM Daerah wajib selaras dan berdasarkan pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi daerah, dan kearifan lokal.

PENYELARASAN RPJMD-RPJMN TAHUN 2025-2029 DITUJUKAN UNTUK MEMASTIKAN SINERGI LANGKAH PEMBANGUNAN

Progres Pengawasan Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri dalam Pelaksanaan Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN 2025-2029 untuk Provinsi Kep. Bangka Belitung

Fase Konsultasi Rancangan
Awal RPJMD 2025-2029

33,33%

9 Sasaran Utama
Pembangunan (SUP)

72,60 %

45 Indikator Utama
Pembangunan (IUP)

Fase Evaluasi Ranperda
RPJMD 2025-2029

100 %

9 SUP

95,89 %

45 IUP

Perda RPJMD 2025-2029

100 %

9 SUP

98,63 %

45 IUP



**Perpres
No.12/2025**
tentang RPJMN
Tahun 2025 –
2029

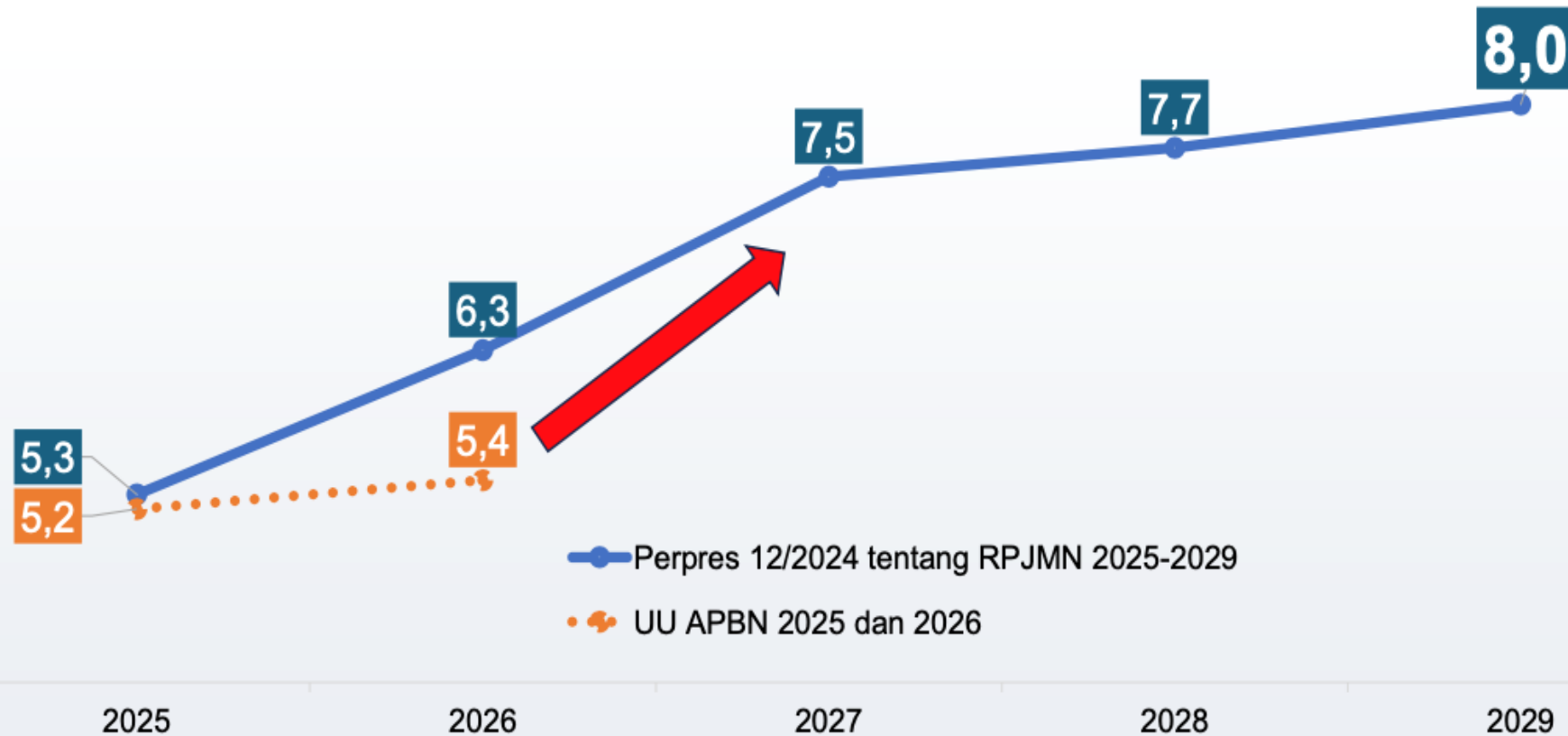


**Inmendagri
No.2/2025**
tentang Pedoman
Penyusunan
RPJMD dan
Renstra
Perangkat Daerah
Tahun 2025 –
2029

TRAJECTORY PERTUMBUHAN EKONOMI JANGKA MENENGAH MENUJU 8% TAHUN 2029: **OPTIMISME DAN REALISTIS**



Sasaran Pertumbuhan Ekonomi 2025-2029 (%)



Sumber : Perpres 12/2025 tentang RPJMN 2025-2029,

[INDIKASI AWAL] RKP TAHUN 2027 BERDASARKAN RPJMN 2025-2029



Kementerian PPN/
Bappenas

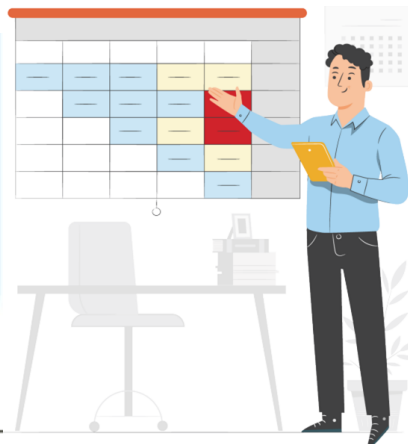


Direktorat
Pembangunan
Indonesia Barat



2025-2029

Penguatan
Transformasi



Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 berdasarkan Rancangan Awal RPJMN 2025-2029 akan difokuskan pada **Percepatan Peletakan Fondasi Transformasi** dengan skenario pertumbuhan ekonomi sebesar **5,60 – 8,30%**

RKP
2027

Percepatan Peletakan Fondasi Transformasi

Skenario Pertumbuhan Ekonomi pada Tahun 2025–2029

RKP
2025

SDM dan Infrastruktur Berkualitas

RKP
2026

Inovasi dan Hilirisasi Industri Berkelanjutan

RKP
2027

Percepatan Peletakan Fondasi Transformasi

RKP
2028

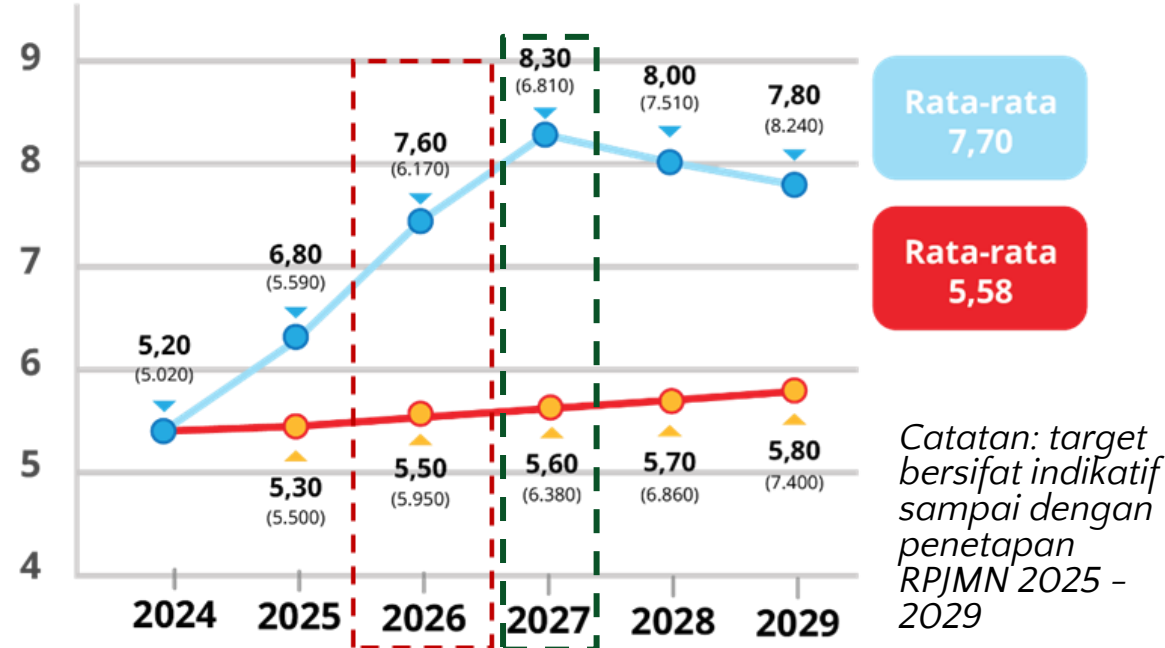
Pemantapan Fondasi Transformasi

RKP
2029

Perwujudan Fondasi Transformasi

persen, yoy
GNI per kapita (dollar AS)

● High
● Low



KONDISI SAAT INI

ARAH KEBIJAKAN

RPJMN 2025-
2029

RPJPN 2025-
2045 Tahap 1
+
Asta Cita

PENETAPAN TEMA PEMBANGUNAN

Tema RKP 2025:
Akselerasi
Pertumbuhan
Ekonomi yang Inklusif
dan Berkelanjutan

Tema RKP 2026:
Kedaulatan Pangan
dan Energi, serta
Ekonomi yang
Produktif dan Inklusif

Tema RKP 2027:
Akselerasi
Pertumbuhan
Berkualitas melalui
Produktivitas,
Investasi, dan
Industri

Tema RKP 2028

Tema RKP 2029

TRISULA PEMBANGUNAN

Mekanisme Transmisi:

Pertumbuhan Ekonomi yang berkelanjutan (↑)

- Penerimaan negara ↑
- Kapasitas Ekonomi (Pemerintah dan Non-Pemerintah, Pusat-Daerah) ↑
- Belanja sektor prioritas ↑

- Deregulasi dan kemudahan berusaha
- Hilirisasi dan pengembangan kawasan industri
- Penguatan rantai pasok & konektivitas wilayah
- Transisi energi bersih dan ekonomi hijau

Peningkatan SDM (↑)

- Infrastruktur layanan dasar
- kesehatan (preventif & protektif), perlindungan sosial adaptif ↑
- Kualitas SDM jangka panjang ↑

- Penguatan gizi dan kesehatan anak sejak dini (pra-stunting & penyakit menular)
- Revitalisasi dan peningkatan kualitas sekolah serta madrasah
- Peningkatan kompetensi dan kesejahteraan tenaga pendidik
- Penguatan layanan kesehatan dasar dan preventif

Penurunan Kemiskinan (↓)

- Produktivitas tenaga kerja ↑
- Akses ke pekerjaan formal ↑
- Upah riil lebih stabil
- Kerentanan terhadap shock ↓

- Bantuan sosial adaptif & usaha produktif afirmatif
- Layanan dasar pendidikan dan kesehatan
- Penciptaan kerja bernilai tambah
- Vokasi dan kewirausahaan inklusif

Impossible trinity, perlu prioritas

ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI

1. PN 1-8
(Framework)
2. Fokus
Pembangunan
Memuat:
 - KPI utama
 - Direktif Presiden
 - Isu Penting
 - Prioritas Pembangunan *high-impact* sesuai dengan sub-tema:
 - ✓ Produktivitas
 - ✓ Investasi
 - ✓ Industri
 - Kerangka Regulasi dan Kelembagaan
3. Intervensi
Kewilayahan

TEMA RKP AKAN DITURUNKAN MENJADI **LANGKAH-LANGKAH KONKRET YANG IMPLEMENTATIF**



Kementerian PPN/
Bappenas



Penekanan prioritas pembangunan pada RKP Tahun 2027 terdiri dari **direktif Presiden** dan program-program lain yang konkret, terukur, dan *high-impact*.

Produktivitas

Penguatan Regulasi dan Kelembagaan

- Standarisasi OECD
- Efektivitas Birokrasi

Peningkatan Kualitas SDM dan Tenaga Kerja

- Makan Bergizi Gratis
- Revitalisasi Sekolah
- Pembangunan Rumah Sakit Berkualitas
- Cek Kesehatan Gratis
- Care Economy

Penguatan Produktivitas dan Daya Beli Masyarakat

- Kartu Kesejahteraan
- Kartu Usaha Afirmatif
- Koperasi Desa Kelurahan/Merah Putih
- Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Digitalisasi dan Efisiensi Tata Kelola

- DTSEN
- Digitalisasi Layanan Logistik
- Pemerintahan Digital

Investasi

Penguatan Iklim Investasi dan Kemudahan Berusaha

- Kemudahan Perizinan

Penguatan Pembiayaan Pembangunan

- Investasi Danantara
- Efisiensi Peran BUMN
- Pembiayaan Inovatif

PMA dan PMDN Berorientasi Industri dan Ekspor sebagai Sumber Pertumbuhan Baru

- KEK Sei Mangkei
- KIT Batang
- DPP Lombok-Gili-Tramena
- DPP Labuan Bajo

Infrastruktur dan Konektivitas Ekonomi

- Jaringan Pelabuhan Terpadu
- Infrastruktur Ketenagalistrikan
- Preservasi Jalan dan Jembatan

Industri

Hilirisasi SDA Strategis

- Hilirisasi Rumput Laut
- Hilirisasi Kelapa Sawit
- Hilirisasi Nikel
- Hilirisasi Bauksit
- Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut

Ekonomi Sirkular dan Industri Berbasis Teknologi Tinggi

- Pengelolaan Sampah
- Industri Alutsista
- Industri Dirgantara
- Pengembangan Mobil Nasional

Swasembada Pangan, Energi, dan Air

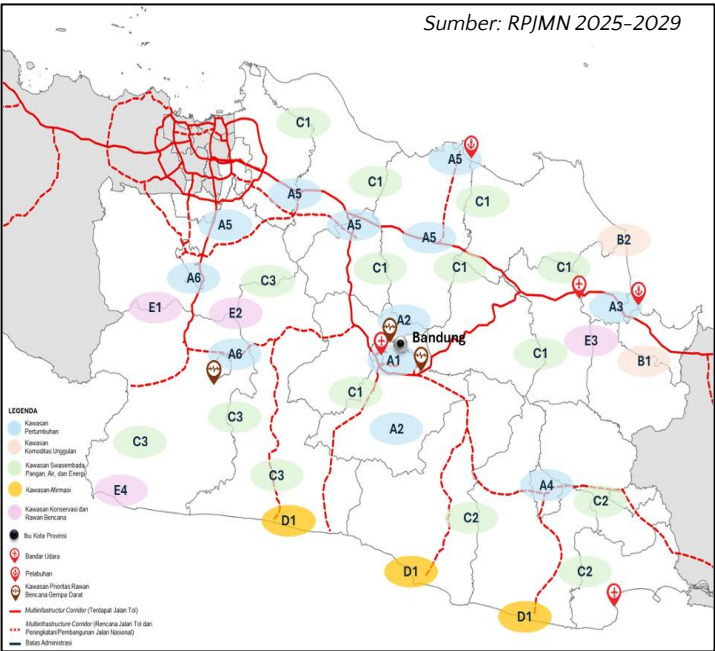
- Kawasan Sentra Produksi Pangan
- Energi Terbarukan
- Transisi Energi Berkeadilan
- Pengembangan SPAM

**Direktif Presiden*

ARAHAN PEMBANGUNAN PROV. JAWA BARAT DALAM RPJMN 2025-2029 UNTUK TAHUN 2027



Tema Provinsi:
 “Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Tata Kelola Pembangunan”



A. Kawasan Pertumbuhan

- WM Bandung, Kawasan Pengembangan Industri Cekungan Bandung
- Kawasan Pariwisata & Ekonomi Kreatif Unggulan Bandung dan Sekitarnya
- Kawasan Perkotaan Cirebon & Kawasan Pengembangan Industri Cirebon-Kertajati
- Kawasan Perkotaan Tasikmalaya
- Kawasan Pengembangan Industri Bogor-Bekasi-Karawang-Purwakarta-Subang-Patimban (termasuk Kawasan Perkotaan Karawang)
- Kawasan Perkotaan Bogor-Sukabumi & Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bogor-Sukabumi-Cianjur

C. Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi

- Swasembada Pangan, Air, dan Energi**
- Citarum-Cimanuk-Cisanggarung (Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kab. Purwakarta, Kab. Karawang, Kab. Bekasi, Kab. Subang, Kab. Indramayu, Kab. Sumedang, Kab. Majalengka, Kab. Cirebon, Kab. Kuningan)
 - Citanduy-Ciwulan-Cilaki (Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kab. Pangandaran)
 - Priangan Barat (Kab. Bogor, Kab. Cianjur, Kab. Sukabumi)

D. Kawasan Afirmasi

- Jawa Barat Bagian Selatan (bagian pesisir selatan Kab. Cianjur, Kab. Garut, dan Kab. Tasikmalaya) (Pemerataan Pembangunan)

B. Kawasan Komoditas Unggulan

- Cirebon-Majalengka (Tebu)
- Indramayu-Cirebon (Ekonomi Biru)

E. Kawasan Konservasi/Rawan Bencana

- TN Halimun-Salak
- TN Gede-Pangrango
- TN Ceremai
- Geopark Ciletuh

Proyeksi Target Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan RPJMN 2025-2029

	LPE (%)	PDRB Per Kapita (Rp Juta)
Prov. Jawa Barat	7,5	70,2
Pulau Jawa	7,5	100,9

*)merupakan proyeksi berdasarkan hasil Exercise RPJMN 2025-2029 dan akan disesuaikan setelah target nasional ditetapkan

Upaya Transformatif dalam Pembangunan Provinsi Jawa Barat



Pembangunan **Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban**



Pengembangan Pelabuhan Perikanan **PPP Eretan dan PPN Kejawanan**



Pengembangan **World Class Research University** Berbasis Potensi Wilayah pada **Institut Pertanian Bogor**

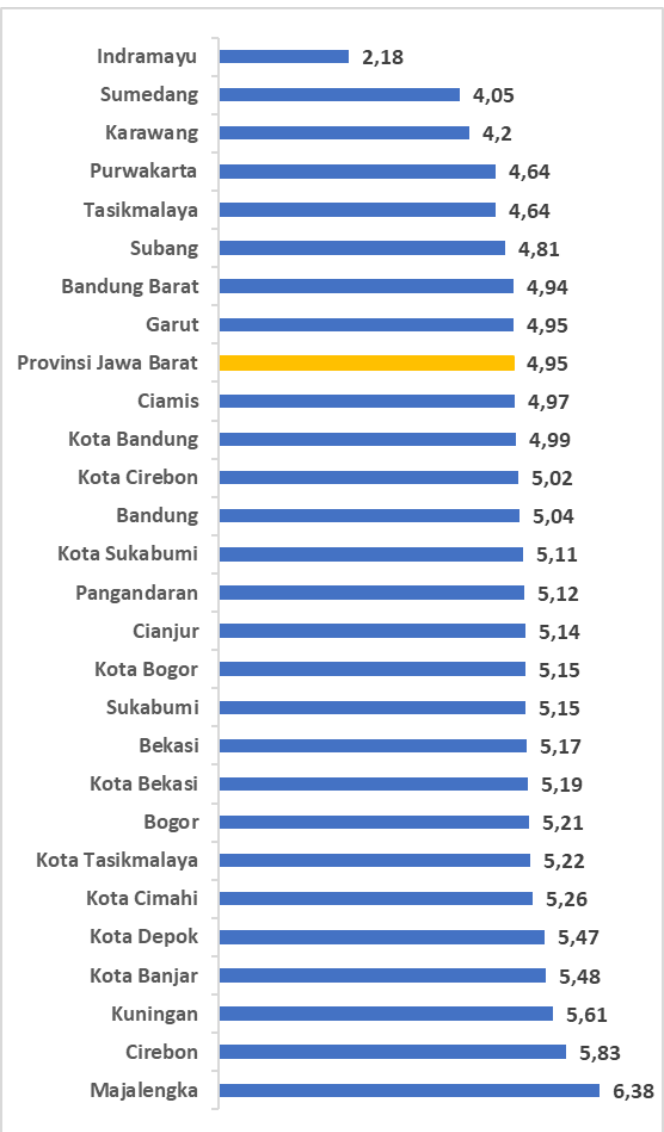
PERTUMBUHAN DAN STRUKTUR EKONOMI PROVINSI JAWA BARAT



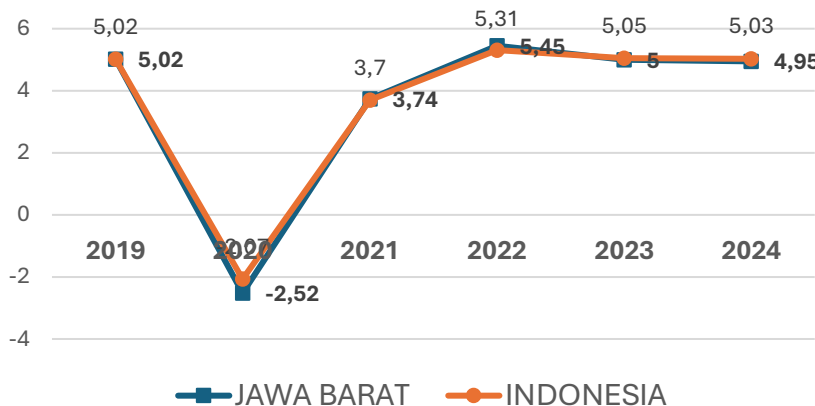
Kementerian PPN/
Bappenas

Direktorat
Pembangunan
Indonesia Barat

LPE Provinsi Jawa Barat Tahun 2024



LPE Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2024



Struktur Ekonomi Provinsi Jawa Barat Tahun 2024



Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat yang **stagnan** belum dapat menjawab isu dan tantangan terkait ketimpangan. Selain itu, Jawa Barat **bagian utara** cenderung bertumpu pada **sektor industri pengolahan**, sementara **bagian selatan** yang bertumpu pada **sektor primer dan jasa** masih memerlukan perhatian

Highlight Respons Kebijakan

- Pengembangan koridor industri **Cekungan Bandung**.
- Pengembangan **KEK Lido**, koridor industri Bogor–Bekasi–Karawang–Purwakarta–Subang–Patimban .
- Pembangunan/revitalisasi **sentra IKM** sebagai rantai pasok industri sedang-besar yang ada di KI/KEK prioritas.
- Pengembangan **Industri Tekstil dan Produk Tekstil**.
- Peningkatan **Konektivitas, Layanan Dasar, dan Pemberdayaan Aktivitas Ekonomi High Value Unggulan** di Jabar Bagian Selatan

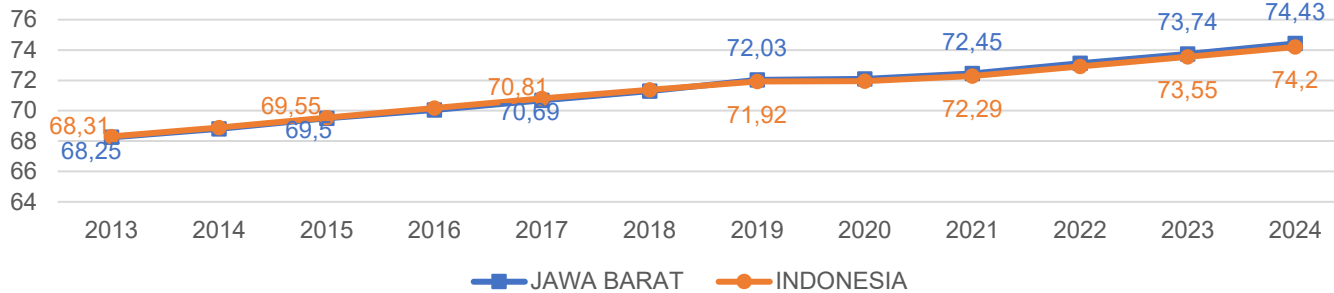
KONDISI SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT



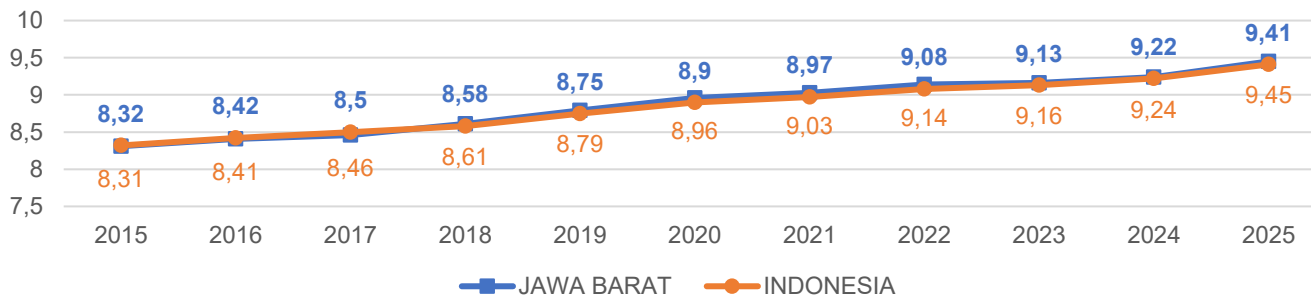
Kementerian PPN/
Bappenas



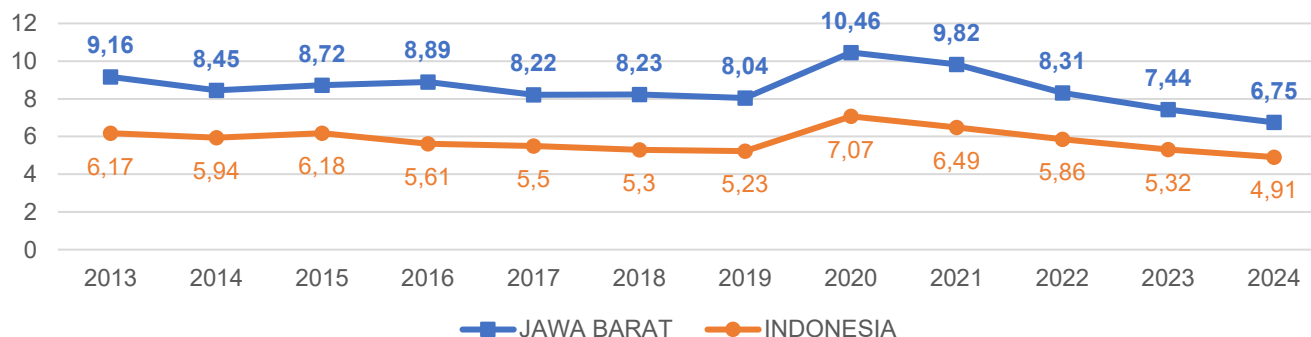
Indeks Pembangunan Manusia Jabar dan Nasional Tahun 2013-2024



RLS Penduduk ≥ 15 Tahun Jabar dan Nasional Tahun 2015-2025



Persentase TPT Jabar dan Nasional Tahun 2013-2024 (%)



Capaian pembangunan manusia Jabar relatif sama dengan nasional, ditandai dengan IPM dan RLS yang hamper sama, namun masih dihadapi pada tantangan ketenagakerjaan ditandai dengan TPT yang jauh di atas rata-rata nasional

- **Peningkatan IPM dan RLS yang konsisten menunjukkan perbaikan kualitas SDM**, namun belum sepenuhnya meningkatkan serapan tenaga kerja lokal.
- **RLS belum berbanding lurus dengan penurunan TPT.**
- TPT tinggi mengindikasikan terdapat **mismatch** antara **kompetensi tenaga kerja** dan **kebutuhan pasar kerja**.

Highlight Respons Kebijakan

- Percepatan **penurunan Anak Tidak Sekolah (ATS)** melalui **perluasan akses pendidikan** formal, nonformal, dan kesetaraan.
- Penguatan **pencegahan ATS** melalui **intervensi sosial-ekonomi**.
- Penguatan **link and match** pendidikan dan pelatihan vokasi dengan **kebutuhan Dunia Usaha Dunia Industri**.
- Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan menengah dan kejuruan, termasuk **reskilling** dan **upskilling tenaga kerja**,
- Penguatan penciptaan lapangan kerja lokal, khususnya pada sektor padat karya.

POSISI STRATEGIS JAWA BARAT DALAM SISTEM PEMBANGUNAN NASIONAL



Kementerian PPN/
Bappenas

Direktorat
Pembangunan
Indonesia Barat

1 Industri Pengolahan



Merupakan basis utama industri pengolahan nasional dan motor pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa.

Lebih dari 52% industri pengolahan nasional berada di Pulau Jawa, dengan Jawa Barat sebagai kontributor terbesar

3 Pendidikan



Merupakan pusat pengembangan sumber daya manusia nasional, dengan konsentrasi pendidikan menengah

dan tinggi terbesar di Indonesia. Jawa Barat menjadi salah satu provinsi dengan jumlah perguruan tinggi dan lulusan terbesar untuk mendukung kebutuhan industri nasional.

2 Ketahanan Pangan



Memiliki posisi strategis sebagai lumbung pangan nasional, terutama untuk komoditas

padi, hortikultura, dan peternakan. Jawa Barat termasuk provinsi dengan kontribusi terbesar terhadap produksi padi nasional memiliki jumlah desa mandiri terbanyak di Pulau Jawa, serta mendukung ketahanan pangan berbasis desa.

Isu & Tantangan:

1. **Ketimpangan kualitas SDM dan akses pendidikan.** Masih terdapat 128 kecamatan yang belum memiliki SMA/SMK negeri.
2. **Kepadatan penduduk terus meningkat** yang menyebabkan **tekanan urbanisasi** dan **alih fungsi lahan pangan**.
3. **Kesenjangan produktivitas industri dan adopsi teknologi**, seperti penggunaan teknologi pertanian canggih oleh sebagian kecil petani.



Highlight Respons Kebijakan

- Hilirisasi industri dan penguatan kawasan industri berdaya saing global.
- Perlindungan lahan pangan berkelanjutan dan modernisasi pertanian.
- Penguatan pendidikan vokasi dan sekolah unggul terintegrasi kebutuhan industri.

1

Peran Jawa Barat sebagai lokomotif pertumbuhan Pulau Jawa menjadi kunci pencapaian target **Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Jawa $\pm 6,9 - 7,9\%$ (2025–2029)**. Pertumbuhan didorong melalui penguatan **industri pengolahan berorientasi hilirisasi**, peningkatan produktivitas kawasan industri, serta dukungan konektivitas logistik dan energi yang andal.

2

Sinkronisasi **perencanaan dan anggaran** yang perlu diperkuat di tingkatan **Pusat dan Daerah** untuk memastikan **efektivitas implementasi program**. Alokasi dana diharapkan dapat **secara konsisten mendukung** Proyek Prioritas Nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN.

3

Penanganan prioritas difokuskan pada peningkatan produktivitas dan daya saing industri, perlindungan lahan pangan berkelanjutan, serta pemerataan kualitas pendidikan dan pengembangan SDM yang selaras kebutuhan industri.

4

Mewujudkan **Jawa Barat sebagai pusat industri berdaya saing dan penyedia sumber daya manusia unggul** memerlukan **integrasi perencanaan pembangunan antarwilayah** di dalam provinsi serta penerapan prinsip **pembangunan berkelanjutan**.



TERIMA KASIH



Kementerian PPN/
Bappenas



Direktorat
Pembangunan
Indonesia Barat

LAMPIRAN



TRANSFORMASI RKP 2027: PENJABARAN TEMA (1/2)



Kementerian PPN/
Bappenas



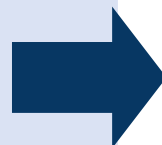
Direktorat
Pembangunan
Indonesia Barat

Penetapan prioritas pembangunan tahunan dapat mengacu pada pentahapan RPJPN agar fokus pembangunan lebih terarah dan mengerucut sesuai fokus pada tiap tahap pembangunan

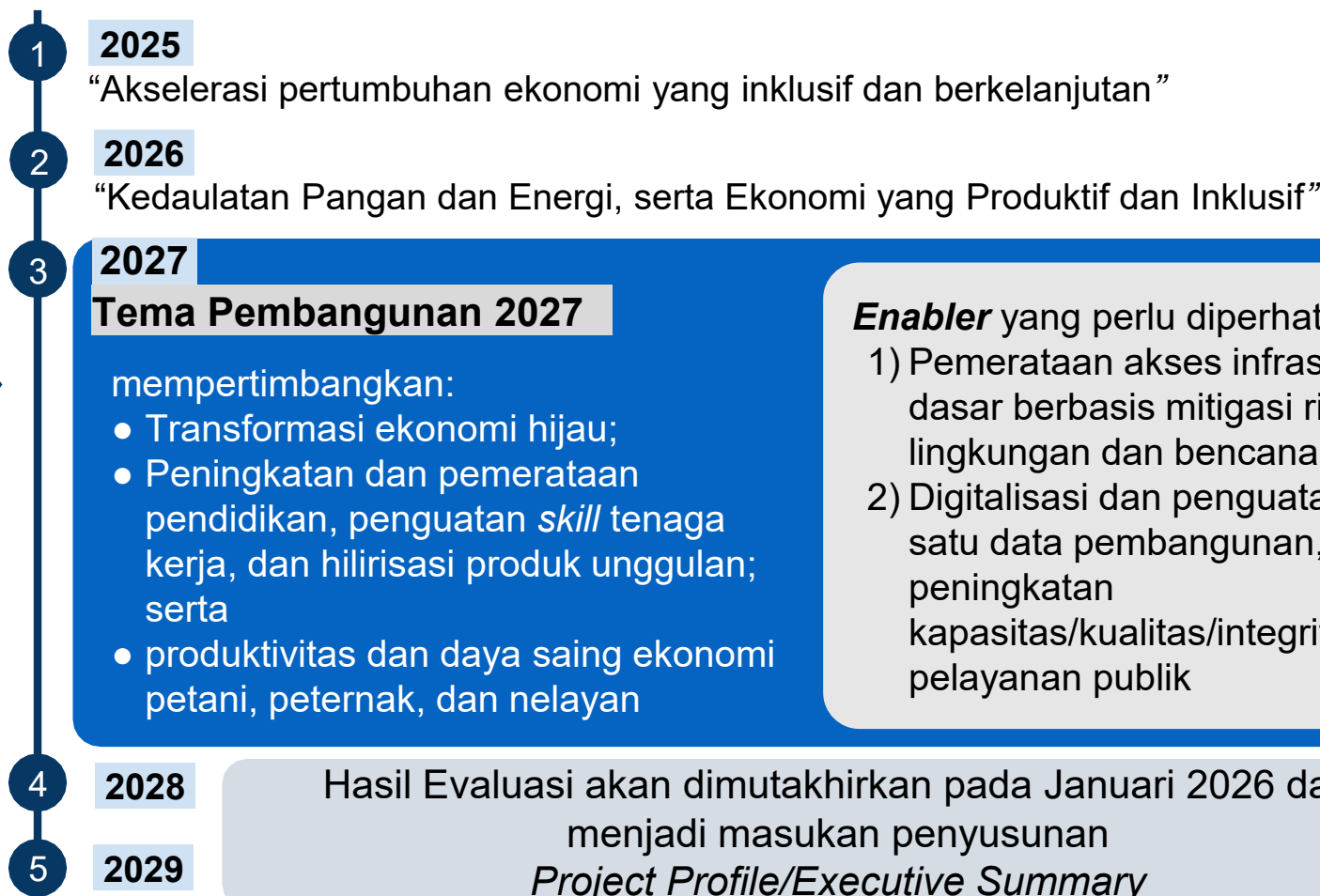
TAHAP I RPJPN 2025-2045 "Penguatan Transformasi"

Pada tahap ini penguatan transformasi dititik beratkan pada, diantaranya*:

- Penuntasan pemenuhan layanan dasar
- Peningkatan kualitas SDM
- Hilirisasi sumber daya alam unggulan
- Peningkatan produktivitas tenaga kerja
- Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan
- Perbaikan kelembagaan dan penataan regulasi
- Supremasi hukum dan stabilitas politik
- Akselerasi tujuan pembangunan berkelanjutan



PENJABARAN TEMA SESUAI PENTAHAPAN



Enabler yang perlu diperhatikan:

- 1) Pemerataan akses infrastruktur dasar berbasis mitigasi risiko lingkungan dan bencana
- 2) Digitalisasi dan penguatan satu data pembangunan, peningkatan kapasitas/kualitas/integritas pelayanan publik

Sumber: UU 59/2024 tentang RPJPN Tahun 2025-2045

TRANSFORMASI RKP 2027: FOKUS DAN TERARAH (2/2)



Kementerian PPN/
Bappenas

Direktorat
Pembangunan
Indonesia Barat

Menyatukan Direktif Presiden, Prioritas Nasional, dan Fokus Pembangunan dalam satu kesatuan narasi untuk mendukung fokus pembangunan tahunan dengan arah dan ukuran keberhasilan yang sama.

KONDISI SAAT INI

Bab 3	Direktif Presiden
Bab 4	
	Prioritas Nasional 1
	Prioritas Nasional 2
	Prioritas Nasional 3
	Prioritas Nasional 4
	Prioritas Nasional 5
	Prioritas Nasional 6
	Prioritas Nasional 7
	Prioritas Nasional 8

PN Memuat:

- Arah Kebijakan yang merupakan Direktif Presiden

TRANSFORM

RKP 2027

Prioritas Nasional 1-8

(disajikan ringkas sebagai *Logical Framework* serta pengawalan IUP tahun 2027)

Fokus Pembangunan

(Direktif Presiden + arah kebijakan/intervensi kebijakan yang menjadi fokus pembangunan, selektif, dan sesuai dengan fokus tema RKP Tahun 2027)

Intervensi Kewilayahan

(diarahkan untuk mendukung fokus pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik, potensi, dan keunggulan masing-masing wilayah)



Fokus dan Terarah

Fokus Pembangunan sebagai penekanan kebijakan dalam narasi RKP

“Transformasi RKP 2027 bukan hanya soal format, tetapi tentang memastikan **Rencana Kerja Pemerintah benar-benar menjadi jembatan antara perencanaan dan penganggaran - efisien, digital, dan fokus pada hasil.**”

ARAH KEBIJAKAN PROVINSI JAWA BARAT DALAM RPJMN TAHUN 2025-2029



Kementerian PPN/
Bappenas

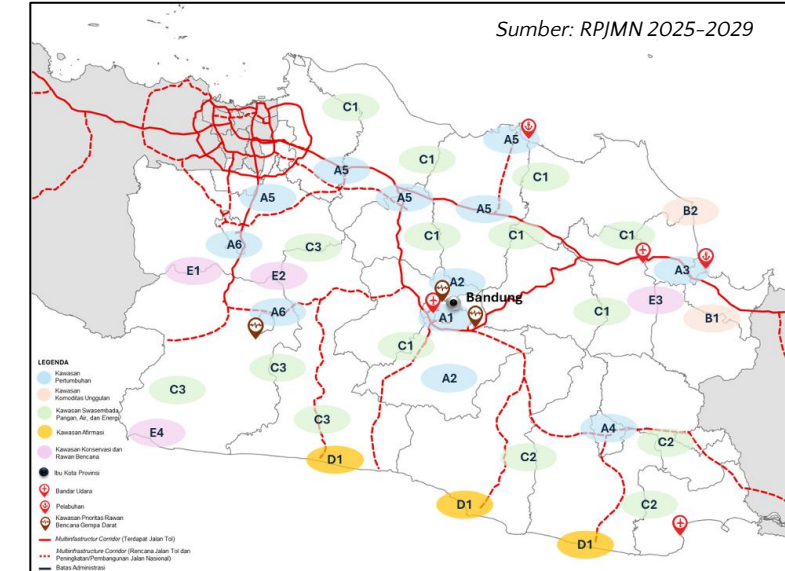
Direktorat
Pembangunan
Indonesia Barat

Tema Pembangunan Jawa Barat:

Pusat *Cutting-Edge Industry*, Inovasi dan Pendidikan STEAM Bertaraf Global, serta Penumpu Ketahanan Pangan Nasional

Arah Kebijakan Provinsi Jawa Barat dalam RPJMN 2025-2029

- WM Bandung, Kawasan Pengembangan Industri Cekungan Bandung (A1)
- Kawasan Pariwisata & Ekonomi Kreatif Unggulan Bandung dan Sekitarnya (A2)
- Kawasan Perkotaan Cirebon & Kawasan Pengembangan Industri Cirebon-Kertajati (A3)
- Kawasan Perkotaan Tasikmalaya (A4)
- Kawasan Pengembangan Industri Bogor-Bekasi-Karawang-Purwakarta-Subang-Patimban (termasuk Kawasan Perkotaan Karawang) (A5)
- Kawasan Perkotaan Bogor-Sukabumi & Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bogor-Sukabumi-Cianjur (A6)
- Kawasan Komoditas Unggulan Cirebon – Majalengka (Tebu) (B1)
- Kawasan Komoditas Unggulan Indramayu – Cirebon (Ekonomi Biru) (B2)
- Kawasan Swasembada pangan, Air, dan Energi Citarum-Cimanuk-Cisanggarung (C1)
- Kawasan Swasembada pangan, Air, dan Energi Citanduy-Ciwulan-Cilaki (C2)
- Kawasan Swasembada pangan, Air, dan Energi Priangan Barat (C3)
- Kawasan Afirmasi Jawa Barat bagian Selatan (D1)
- Kawasan Konservasi/Rawan Bencana TN Halimun-Salak (E1)
- Kawasan Konservasi/Rawan Bencana TN Gede-Pangrango (E2)
- Kawasan Konservasi/Rawan Bencana TN Ceremai (E3)
- Kawasan Konservasi/Rawan Bencana Geopark Ciletuh (E4)



Upaya Transformatif dalam Pembangunan Provinsi Jawa Barat



Pembangunan Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban



Pengembangan Pelabuhan Perikanan PPP Eretan dan PPN Kejawanan



Pengembangan *World Class Research University* Berbasis Potensi Wilayah pada Institut Pertanian Bogor



Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)

Target RKP

5,1

Realisasi

TW I: **4,99**
TW II: **5,23**
TW III: **5,20**



Tingkat Kemiskinan (%)

Target RKP

5,85 – 6,46

Realisasi

7,02
*Maret 2025



Rasio Gini

Target RKP

0.383 - 0.390

Realisasi

0,416
*Maret 2025



Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

Target RKP

6.42 – 6,99

Realisasi

6,77
*Agustus 2025

Executive Insight dan Implikasi terhadap RKP 2027

Berdasarkan beberapa sasaran indikator utama pembangunan, beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Pertumbuhan ekonomi sudah mencapai target pada TW II dan III, menunjukkan kinerja baik dan relatif stabil, sehingga **momentum pertumbuhan** perlu dijaga melalui **penguatan sektor produktif dan investasi**.
2. **Besarnya rasio gini** menunjukkan **ketimpangan pembangunan**, sehingga diperlukan **pemerataan ekonomi melalui penguatan ekonomi lokal**.
3. **Tingkat kemiskinan masih sangat tinggi** dan belum memenuhi target RKP, mengindikasikan **manfaat pertumbuhan ekonomi belum optimal** dirasakan khususnya bagi **kelompok rentan dan MBR**.
4. Realisasi TPT sudah memenuhi target, akan tetapi **tetap diperlukan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan berkelanjutan** untuk menekan angka TPT.

INEFISIENSI INVESTASI DALAM PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI JAWA BARAT



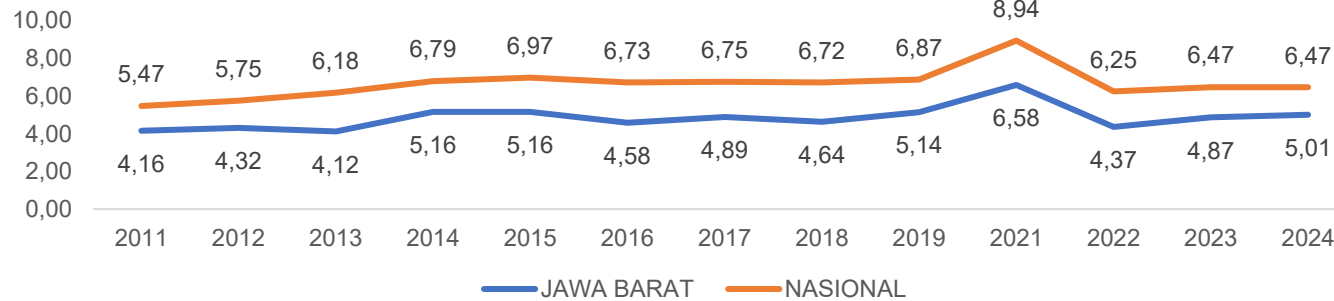
Kementerian PPN/
Bappenas

Direktorat
Pembangunan
Indonesia Barat

Tingginya Nilai ICOR di Jawa Barat menandakan belum efektifnya investasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meskipun realisasi investasi terus meningkat

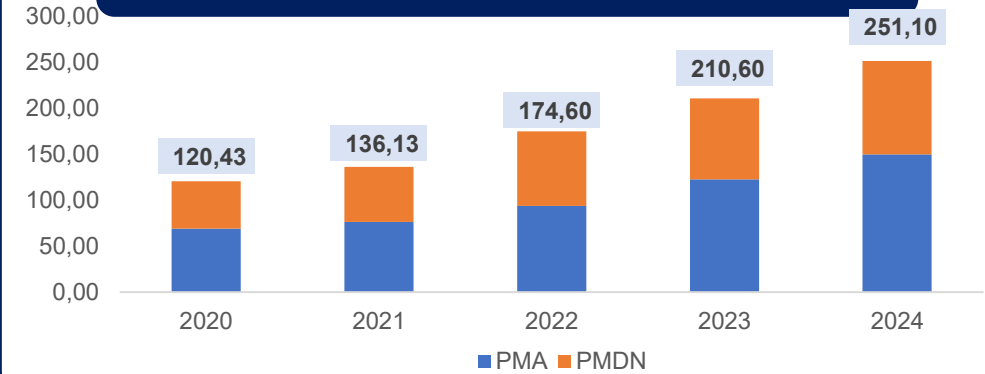
Presiden menargetkan ICOR Indonesia menjadi 4% dalam 3-4 tahun ke depan

Perbandingan ICOR Jawa Barat dan Nasional:
Nilai ICOR Jawa Barat di bawah dari ICOR Nasional



- Nilai investasi Jabar 2024 mencapai **Rp251,1 T** (14,1% dari total investasi di Indonesia) → mengalami **pertumbuhan sebesar 0,14%** (YoY) dari 2023 → **inefisiensi investasi** karena **nilai ICOR sebesar 5,01% di 2024 (masih di atas target 4%)**.
- Kondisi investasi Jabar didominasi oleh **Industri Pengolahan** dengan capaian realisasi mencapai **Rp184,9 T** (Januari-September 2024).
- Mengindikasikan potensi Jabar sebagai **provinsi hilirisasi strategis**.

Realisasi Investasi Jabar
(Triliun Rupiah)



Sumber: Kementerian Investasi/BKPM



Highlight Respons Kebijakan

- Pengembangan KEK Lido, koridor industri Bogor–Bekasi–Karawang–Purwakarta–Subang–Patimban.
- Pembangunan Jalan Tol dan jalur KA akses Pelabuhan Patimban.
- Perencanaan dan persiapan pembangunan Kereta Api Cepat (HST) Jakarta – Surabaya.
- Pengembangan koridor industri Cirebon – Kertajati (industri prioritas: industri dirgantara dan industri mesin dan perlengkapan).

KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN PROVINSI JAWA BARAT

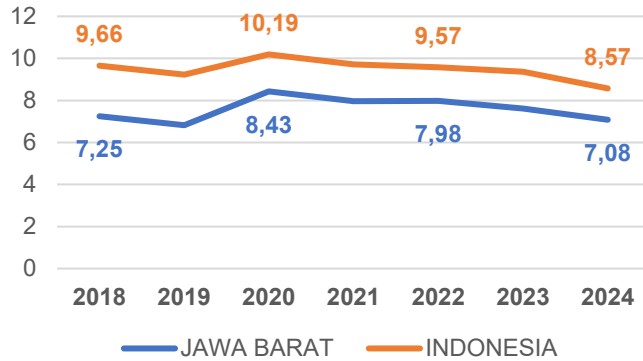


Kementerian PPN/
Bappenas

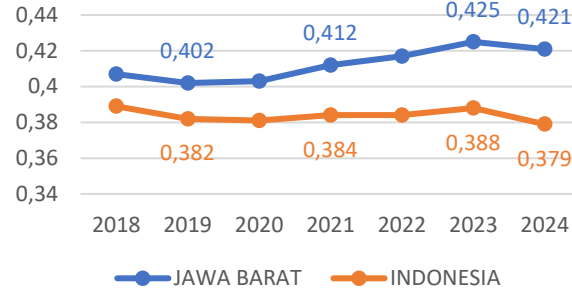


Direktorat
Pembangunan
Indonesia Barat

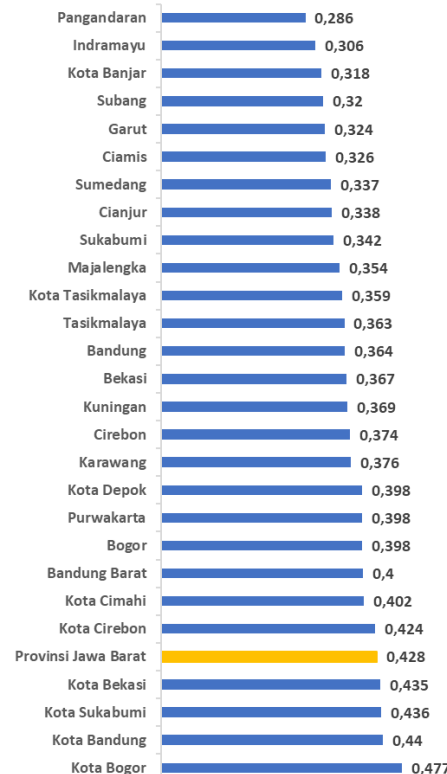
Persentase Penduduk Miskin Jabar dan Nasional 2018-2024 (%)



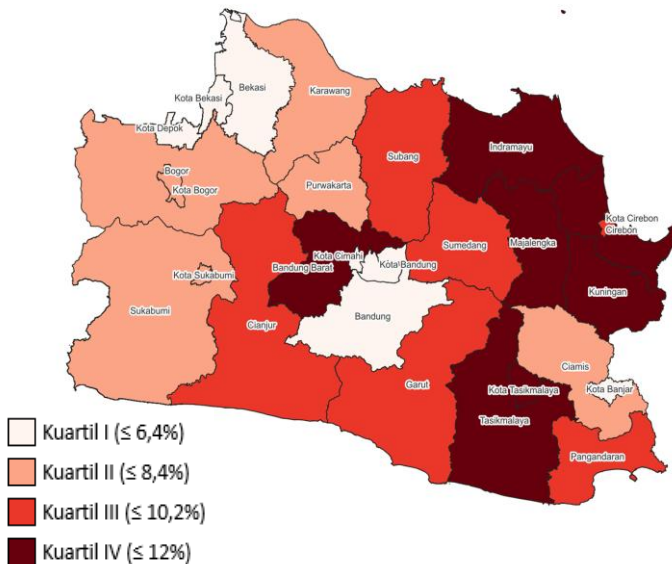
Rasio Gini Jabar dan Nasional Tahun 2018-2024 (%)



Rasio Gini Jabar Tahun 2024



Peta Sebaran Tingkat Kemiskinan Jabar 2024



Secara agregat, tingkat kemiskinan dan ketimpangan Jabar masih lebih rendah dibandingkan nasional, namun **penguatan struktur ekonomi** dan **penguatan kualitas SDM** diperlukan guna mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berdaya saing

- **24.2%** dari total penduduk miskin berada pada **Wilayah Jawa Barat bagian Selatan**.
- Kabupaten/kota yang **memiliki tingkat kemiskinan relatif tinggi** cenderung memiliki **struktur ekonomi berbasis sektor primer**.
- Wilayah **perkotaan** dan **Kawasan Industri** menunjukkan **tingkat rasio gini lebih tinggi**.
- **Variasi tingkat kemiskinan dan rasio gini** antar kab/kota menegaskan **kuatnya ketimpangan spasial intra-provinsi Jabar**.

Highlight Respons Kebijakan

- Penyediaan dan peningkatan **layanan dasar** di wilayah perdesaan dan tertinggal.
- Peningkatan **konektivitas dan aksesibilitas antarwilayah** (jalan, internet, dan telekomunikasi).
- Pemutakhiran **Data Tunggal Kemiskinan**.
- Pengurangan **Beban Pengeluaran**: Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial.
- Pengembangan ekonomi berbasis keunggulan wilayah melalui **penciptaan lapangan kerja lokal**